

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets dalam kuliahnya pada Peringatan Nobel mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.”¹

Pertumbuhan ekonomi secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan penerimaan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan

¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan penerjemah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), p. 57

sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.²

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan output perkapita. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk, sebab apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik.³

Jadi dari ketiga definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan naiknya output atau kapasitas produksi perkapita secara riil dari tahun ke tahun atau periode tertentu untuk menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Angka yang digunakan untuk mengukur perubahan output adalah tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam perekonomian daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

² Eko P. Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009), p. 237

³ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009) p. 1-2

b. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, tidak hanya faktor ekonomi namun sektor diluar ekonomi juga sangat menunjang. Beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi diantaranya:

1) Sumber alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Namun dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat terjadi meskipun negara itu kekurangan sumber alam apabila negara tersebut dapat menemukan sumber-sumber daya alam yang baru melalui penelitian dan pengembangan. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi sendiri, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup. Yang terpenting ialah pemanfaatan secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat digunakan secara jangka panjang.

2) Akumulasi modal

Faktor ekonomi penting yang kedua ialah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Akumulasi atau pembentukan modal dalam hal ini merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional dan penerimaan nasional.

3) Organisasi

Peran organisasi dalam pertumbuhan adalah berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, wiraswastawan berperan sebagai organisator dan pengambil risiko diantara ketidakpastian. Organisator yang lainnya mencakup pemerintah, bank dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat di dalam memajukan ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang.

4) Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5) Pembagian kerja dan skala produksi

Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya karena pembagian kerja dapat menghemat waktu.

c. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Harrod dan Domar

Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara-negara maju. Harrod dan Domar mencari tingkat pertumbuhan penerimaan yang diperlukan bagi kehidupan perekonomian yang berjalan mulus dan tak tersendat-sendat. Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Peranan tersebut yang pertama adalah investasi menciptakan penerimaan hal ini disebut juga dampak permintaan dan yang kedua, investasi memperbesar produksi perekonomian melalui stok modal yang meningkat disebut dampak penawaran investasi. Karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, penerimaan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium penerimaan pada *full employment* dari tahun ke tahun, baik penerimaan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat.

2) Teori Solow dan Swan

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow (1956) dan Swan (1956). Model Solow dan Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-domar adalah masuknya unsur kemajuan

teknologi. Selain itu Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar modal (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Mengenai mekanisme pasar, Solow-Swan berpendapat bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga campur tangan pemerintah hanya sebatas pembuat kebijakan fiskal dan moneter.

3) Teori Romer

Model teori pertumbuhan yang diungkapkan Romer disebut juga dengan teori pertumbuhan endogen. Romer berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi, dengan fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = F(A, K, L, H)$$

Dimana A adalah perkembangan teknologi, K adalah modal fisik, H adalah sumberdaya manusia, akumulasi dari pendidikan, dan L adalah tenaga kerja.

Romer menjelaskan model pertumbuhan endogen bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan perkapita dalam perekonomian adalah :

$$g - n = \beta / [1 - \alpha + \beta]$$

dimana g adalah tingkat pertumbuhan *output*, n adalah tingkat pertumbuhan populasi, β adalah perubahan teknologi, dan α adalah elastisitas output terhadap modal. Seperti dalam model Solow dengan skala hasil konstan $\beta=0$, maka pertumbuhan penerimaan per kapita akan menjadi nol (tanpa adanya kemajuan teknologi).

Namun Romer mengasumsikan bahwa dengan mengumpulkan ketiga faktor produksi termasuk eksternalitas modal, maka $\beta > 0$ sehingga $g - n > 0$ dan Y/L (penerimaan perkapita) akan mengalami pertumbuhan. Hal yang menarik dalam model Romer adalah adanya imbasan investasi atau teknologi yang semakin meningkat, sehingga menghilangkan asumsi hasil yang semakin menurun (*diminishing marginal product of capital*).

d. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Nasional

1) Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan indikator yang biasa dijadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari satu periode dengan periode sebelumnya. Pendapatan nasional yang menggambarkan besarnya output nasional sebagai gambaran awal tentang efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahaan). Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil tergambar dari kenaikan GDP/GNP berdasarkan harga konstan. Untuk

menghitung pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara perubahan pendapatan nasional tahun yang dimaksud dikurangi pendapatan nasional tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

2) Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode satu tahun tersebut. Dari pendapatan perkapita tersebut kita dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan cara membandingkan dari satu periode ke periode lain. Besar kecilnya output perkapita ini juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran suatu negara, semakin besar output perkapita maka tingkat kemakmuran dianggap makin tinggi.

2. Desentralisasi Fiskal

a. Konsep Desentralisasi

Dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif.⁴

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 86

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.⁵

Menurut Sidik desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintahan pusat.⁶

⁵ Ibid, hlm. 87

⁶ Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, materi ini disampaikan pada seminar nasional “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi daerah di Indonesia” (Yogyakarta, 2002). Hlm. 2

Menurut Koeswara (2001:480) PBB memberikan batasan tentang desentralisasi sebagai berikut:⁷

“Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies.

(deentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah).”

Menurut Rondinelli, desentralisasi mencakup dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga semi-otonom (delegasi), dan pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada lembaga non-pemerintah (privatisasi).⁸ Untuk lebih jelasnya dalam sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi, desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah; sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pusat daerah.⁹

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan perbedaan desentralisasi dengan dekonsentrasi.

⁷ Hanif Nurcholis, *Teori&Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005). p.

9

⁸ *Ibid*

⁹ Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), p.

Tabel II.1
Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi

No.	Desentralisasi	Dekonsentrasi
1.	Menciptakan daerah otonom	Menciptakan perangkat pusat di berbagai daerah
2.	Memiliki batas-batas wilayah yuridiksi daerah otonom	Yang ada adalah batas-batas wilayah kerja/jabatan/administrasi
3.	Penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi	Pelimpahan wewenang pemerinthan hanya bidang administrasi
4.	Yang disertai wewenang politis dan administratif adalah daerah otonom	Yang diberi limpahan wewenang adalah perangkat/pejabat pusat
5.	Menimbulkan otonomi daerah	Tidak menimbulkan otonomi daerah
6.	Daerah otonom berada di luar hirarki organisasi pemerintahan pusat. Hubungannya adalah antar organisasi publik.	Wilayah administrasi berada dalam hirarki organisasi pemerintah pusat. Hubungannya adalah intra organisasi
7.	Wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenang yang dimiliki presiden dan para menteri	Wewenang pemerintahan yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi, pengawasan, tramtib, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dan menteri-menteri teknis.
8.	Pembiayaannya dari APBD	Pembiayaannya dari APBN

Sumber: Hanif Nurcholis (2002)

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi itu sendiri adalah tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁰

¹⁰ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 21

b. Konsep Desentralisasi Fiskal dan Kebijaksanaanya di Indonesia

Menurut Saragih desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.¹¹

Bahl (2008) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai *“Fiscal Decentralization is all about the central government’s passing budgetary authority to elected subnational governments in the form of the power to make taxing and spending decisions.”*¹²

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Satu hal penting yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwa desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan suatu tujuan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme

¹¹ J.P Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) p. 83

¹² Roy Bahl, CAF working papers “The Pillars of Fiscal Decentralization”, (2008)

hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Hal penting lainnya yang juga harus dipahami oleh semua pihak, bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.¹³ Penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasai oleh pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan yang semakin luas dalam rangka otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai dengan prinsip *money follow function* dalam desentralisasi fiskal untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka diberikan pendanaan melalui kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grants*) atau dikenal sebagai dana perimbangan.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

¹³ *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang utama.

Sumber PAD itu berasal dari:

a. Pajak daerah

1) Pajak provinsi:

- Pajak kendaraan bermotor;
- Bea balik nama kendaraan bermotor;
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- Pajak air permukaan;
- Pajak rokok.

2) Pajak Kabupaten/kota:

- Pajak hotel;
- Pajak restoran;
- Pajak hiburan;
- Pajak reklame;
- Pajak penerangan jalan;
- Pajak mineal bukan logam dan batuan
- Pajak parkir;
- Pajak air tanah;
- Pajak sarang burung walet;
- Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- Bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah yang dimaksud antara lain jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Penerimaan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan, merupakan dana bagian daerah yang berasal dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) baik dana bagi hasil pajak maupun bukan pajak.
DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi Bangunan (PBB), PPh pasal 25 dan PPh 21 serta cukai tembakau. Sedangkan DBH bukan pajak bersumber dari hasil sumber daya alam yang terdiri atas, kehutanan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi serta panas bumi. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) telah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKAPD).
- b. Dana Alokasi umum, dimana dana tersebut berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemetaan kemampuan keuangan antar-daerah

untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 penetapan DAU sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto (PDNN) yang ditetapkan dalam APBN

Besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana DAU untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dikalikan dengan 26 % dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Nasional. Dengan demikian besarnya alokasi DAU untuk suatu kabupaten/kota dapat ditulis sebagai berikut :

Alokasi DAU suatu kabupaten/kota = $90\% \times 26\% \times \text{PDN} \times \text{bobot kabupaten/kota}$.

Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Celah fiskal itu sendiri merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah dihitung sebagai hasil perkalian rata-rata belanja daerah secara nasional dengan jumlah perkalian bobot variabel indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi. Sedangkan kapasitas fiskal merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dilokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu

dengan tujuan membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah seperti untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana fisik yang juga menjadi prioritas nasional. Daerah yang mendapat DAK adalah daerah dengan indeks kemampuan keuangan daerah dibawah rata-rata nasional. Alokasi DAK per tahun suatu daerah dihitung sebagai perkalian bobot daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.

3. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat. Sumber Pinjaman adalah dari dalam negeri (dari pemerintah Pusat, atau dengan penerbitan obligasi) dan dari Luar Negeri, dengan persetujuan dan melalui Pemerintah Pusat.

c. Indikator Desentralisasi Fiskal

Berbagai ukuran desentralisasi fiskal masih banyak dikembangkan, belum ada ukuran atau indikator yang secara baku menggambarkan desentralisasi fiskal itu sendiri. Pada penelitian ini indikator yang akan digunakan menggabungkan beberapa indikator dari berbagai penelitian. Diantaranya adalah:

- 1) Indikator Kapasitas Pengeluaran (*Expenditure Capacity*)

Sebagaimana pengukuran desentralisasi yang digunakan oleh Zhang dan Zou (1998), Akai dan Sakata (2002), Wibowo (2008). Indikator ini merupakan rasio total pengeluaran kabupaten/kota terhadap total pengeluaran kabupaten/kota ditambah provinsi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas dasar besarnya pengeluaran atau belanja.

2) Indikator Kapasitas Pendapatan (*Revenue Capacity*)

Dari sisi pendapatan, desentralisasi fiskal digambarkan melalui rasio Penerimaan Asli Daerah (PAD) dibagi Total Pendapatan Daerah. PAD yang merupakan sumber utama pembiayaan keuangan daerah otonom seharusnya dapat menjadi bagian yang paling penting yang harus digali guna menghindari ketergantungan daerah otonom dari dana bantuan pusat. Rasio ini dimaksudnya melihat seberapa besar PAD menjadi bagian penting dalam penerimaan daerah.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi baik yang dilakukan di Indonesia maupun negara lain memiliki kesimpulan yang beragam, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2
Penelitian Yang Relevan

No.	Peneliti	Judul	Publikasi	Indikator Desentralisasi Fiskal	Hasil Kesimpulan
1.	Hadi Sasana	Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1	$\frac{PAD + (\text{Dana Bagi Hasil})}{\text{Pengeluaran}}$	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi
2.	Faishal Fadli (2014)	<i>Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity (case study Povinces in East and west Indonesia)</i>	<i>Journal of Economics and Sustainable Development</i> Vol. 5, No.18	$\frac{PAD + (DAU + DAK + DBH)}{\text{Total Pengeluaran}}$	Positif signifikan
3.	Muhammad Zahir Faridi (2011)	<i>Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth</i>	Pakistan Journal of Social Science Vol.31, No.1	RPEP: $\frac{\text{Pengeluaran Provinsi}}{\text{Pengeluaran nasional}}$ RPV: $\frac{\text{Pengeluaran Provinsi}}{\text{Pendapatan Provinsi}}$	RPEP: positif tidak signifikan RPV: positif signifikan

				AEP: $\frac{\text{Pengeluaran Provinsi}}{\text{pengeluaran nasional}}$ (dikurangi biaya pertahan dan hutang)	AEP: positif signifikan
4.	Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2002)	<i>Fiscal Decentralization contributes to economic growth:evidence from state-level cross-section data for the US</i>	Journal of Urban Economics	Indikator penerimaan: $R1: \frac{\text{penerimaan kabupaten/kota}}{\text{penerimaan pusat}}$ Indikator pengeluaran: $P1: \frac{\text{pengeluaran kabupaten/kota}}{\text{pengeluaran pusat}}$ Indikator otonomi: $AI1: \frac{PAD}{\text{penerimaan} - \text{dana bantuan pusat}}$ $AI2: \frac{PAD}{\text{Penerimaan} + \text{dana bantuan pusat}}$ $PR1: \frac{\text{pengeluaran} + \text{penerimaan}}{2}$	R1, P1 dan PR1 menunjukkan hasil yang Positif signifikan. AI1 dan AI2 tidak signifikan
5.	Puji Wibowo (2008)	Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal keuangan publik Vol.5, No.1	Indikator Penerimaan: $RI - 1: \frac{\text{Penerimaan kabupaten/kota} - (DAU, DAK)}{\text{penerimaan pusat}}$ $RI - 2: \frac{\text{Penerimaan kabupaten/kota} + (DAU, DAK)}{\text{penerimaan pusat}}$	RI 1 dan 2, positif signifikan

				<p>Indikator Pengeluaran:</p> $EI - 1: \frac{\text{Pengeluaran kabkot}}{\text{pengeluaran kabkot dan provinsi}}$ $EI - 2: \frac{\text{pengeluaran pemda tk. 1}}{\text{pemerintah pusat}}$ <p>Indikator Otonomi:</p> $AI - 1: \frac{PAD}{\text{total pendapatan daerah (TPD)}}$ $AI - 2: \frac{PAD}{TPD - (DAU, DAK)}$ $AI - 3: \frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran}}$ $AI - 4: \frac{PAD}{\text{Dana Perimbangan}}$	<p>EI 1 dan 2, positif signifikan</p> <p>AI 1, 3, dan 4 kurang signifikan</p> <p>Dan AI-2 negatif signifikan.</p>
6.	Jumadi, M. Pudjiharjo, ghozali Maski, dan Moh. Khusaini	<i>The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java</i>	<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science</i>	<p>Sisi pengeluaran:</p> $\frac{\text{pengeluaran langsung}}{\text{Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)}}$ $\frac{\text{pengeluaran tidak langsung}}{\text{Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)}}$	Negatif tidak signifikan

7.	Bayu Kharisma (2013)	Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum (1995-2000) dan sesudah Era Desentralisasi (2001-2004) Fiskal di Indonesia	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 14, No. 2	<p>Sisi Penerimaan:</p> $\frac{\text{Total PAD}}{\text{PAD} + \text{Penerimaan dalam negeri}}$ <p>Sisi Pengeluaran:</p> $\frac{\text{Total Pengeluaran daerah (TPD)}}{\text{TPD} + \text{Pengeluaran pusat}}$ <p>Hubungan PAD terhadap Dana Perimbangan:</p> $\frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}}$	<p>Pada era Desentralisasi, pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran signifikan namun pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar pada sisi pengeluaran dibanding penerimaan. Sementara itu hubungan antara PAD dan Dana perimbangan, pengaruh anggaran daerah dalam meningkatkan pertumbuhan daerah melalui dana perimbangan lebih besar dibandingkan dari pendapatan asli daerah itu sendiri.</p>
8.	Freddy Situngkir, Sirojuzilam, Eelina dan Agus Suriadi	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara	Jurnal Ekonomi, Vol.17, No. 3, Juli 2014	<p>Indikator Penerimaan:</p> $\text{Bruto: } \frac{\text{Pendapaatan kabupaten/kota}}{\text{Pendapatan pusat}}$ $\text{Netto: } \frac{\text{Pendapatan kabkot (Dana Perimbangan)}}{\text{pendapatan pusat}}$ <p>Indikator Pengeluaran:</p> $\frac{\text{pengeluaran kabupaten/kota}}{\text{pengeluaran pusat}}$ <p>Indikator Otonomi:</p>	<p>Indikator pendapatan Bruto menunjukkan hasil hubungan negatif signifikan, sedangkan pendapatan netto menunjukkan hubungan positif tidak signifikan</p> <p>Indikator Pengeluaran menunjukkan hasil negatif signifikan</p>

				$IO1: \frac{PAD}{Total\ pendapatan\ daerah}$ $IO2: \frac{PAD}{Pengeluaran\ daerah}$ $IO3: \frac{PAD}{Dana\ Perimbangan}$	<p>Dan Indikator Otonomi 1 dan 2 menunjukkan hubungan negatif tidak signifikan sementara IO3 positif tidak signifikan.</p>
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Teoritik

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Dukungan terhadap desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari penjelasan Litvack et l. (1998) sebagaimana dikutip Sidik (2000) yang mengemukakan bahwa beberapa ahli seperti Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995) memberikan argumen mendukung desentralisasi yaitu bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah lokal yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena:

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritik yang telah dikemukakan maka diduga sementara:

1. Terdapat pengaruh positif antara desentralisasi fiskal indikator kapasitas pengeluaran (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Terdapat pengaruh positif antara desentralisasi fiskal indikator kapasitas penedapatan (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.